



PT MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 8 Maret 2023

No. : 044/MHI-VLK/III/2023
Perihal : Keputusan Survailen VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa**

Dk. Kedungwinong RT 01 RW 01, Ds. Kedungwinong

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Survailen 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari 2023 di PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 8 Maret 2023, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa No. 0061/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal **13 Februari 2026**, dengan ruang lingkup :
 - a. Pemegang Izin : PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa
 - b. Lokasi Pabrik : Dk. Kedungwinong RT 01 RW 01, Ds. Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
 - c. Izin Usaha : NIB No. 9120010071288
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Wood Pellet (10.800 m3/th)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,
PT MUTU HIJAU INDONESIA

Vysca Arryani

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

